



Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

Ciptakan Kabupaten Ramah Disabilitas



Kausalitas



Apa yang dibenak Anda saat memasuki bulan Zulhijah? Berkurban? Berhaji? Atau nikmatnya menyate?

Bagi umat Islam, bulan Zulhijah adalah waktu mengingat kisah Nabi Ibrahim as dan juga putranya Ismail as. Sejarah Idu-ladha tidak terlepas dari keduanya yang memberi keteladanan, keikhlasan dan kesalehan.

Ibrahim as yang belum lama memiliki putra semata wayangnya, justru diperintahkan Allah swt untuk menyembelih putranya. Ibrahim as tak sedikitpun ragu untuk mengikhlasakan putranya. Dan saat dipuncak keikhlasan sebagai hamba, Tuhan menggantikannya dengan seekor kambing/domba.

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan ibadah kurban setiap hari raya Iduladha. Umat Islam menyembelih kurban dari kambing, sapi, unta, kerbau sebagai bentuk keimanan. Daging kurban pun biasa akan dibagikan bagi seluruh warga dan masyarakat.

Jika kita melihat perintah tersebut, maka berkorban adalah kausalitas. Kausalitas berhubungan dengan sebab-akibat. Setiap perilaku dan perintah memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahuluinya.

Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian (sebab) dan kejadian kedua (akibat atau dampak), yang mana kejadian kedua dipahami sebagai konsekuensi dari yang pertama. Begitupun dengan perintah berkorban yang semula karena penyebab Ibrahim as diperintah untuk menyembelih putranya.

Kami jajaran redaksi majalah Cirebon Katon tentu mengucapkan selamat merayakan Iduladha 1444 H bagi segenap umat Islam. Semoga melalui ibadah kurban di tahun ini, kesalehan diri dan kesalehan sosial senantiasa terwujud.

Edisi Juni ini, kami sajikan tema mengenai kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon. Selamat membaca!



Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Hj Eriati
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah
(Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

H. Sofwan, S.T
(Ketua Komisi 1)

Pandi, S.E
(Ketua Komisi 2)

Anton Maulana, S.T, M.M
(Ketua Komisi 3)

Aan Setiawan, S.Si
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

Nisa Afidah, SH
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Dra. Puti Amanah Sari
(Pj Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Dra. Puti Amanah Sari
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

Redaktur :

Yusuf

Reporter :

Supardi • Kustano • Riyani • Amir

Fotografer :

Qushoy

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman

Distribusi :

Firman • Misbah

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

Nasib Penyandang Disabilitas
Tak Dapat Hak Pelayanan Publik

8 | Luthfi: Perlu Komitmen Penuhi Hak
Kesetaraan Disabilitas



14 | KILAS

Tinjau Peningkatan Jalan Winong-Jemaras Kidul



18 | PUBLIKA

Butuh PJU di Jalan Belawa



22 | LENSА

Di Tangan Ondi, Ban Bekas Jadi Kreativitas



24 | PROFIL

Asep Pamungkas
Dari Penyuluh Pertanian hingga Sekwan

28 | DINAMIKA

Jelang Pilwu Serentak 2023
Laporan Keuangan Desa Harus Selesai

30 | Komisi III: Pengembang Perumahan Wajib Bantu
Perbaikan Jalan

32 | Komisi I: Desa Harus Inventarisasi Aset

34 | Dorong Peningkatan Kesejahteraan Puskesmas



36 | POTENSI

Garden Ciberes
Wisata Baru yang Berdiri Saat Pandemi



38 | DESA

Losari Kidul
Bakal Punya Pasar Modern

Nasib Penyandang Disabilitas Tak Dapat Hak Pelayanan Publik

Meski penyandang disabilitas diakui bertambah dalam setiap tahun, namun tak dibarengi dengan jumlah pelayanan publik ramah disabilitas. Mengapa?



foto-foto: Amli/ck

Oni masih mengantre di belakang deretan barisan orang saat akan membuat e-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Bedanya ia tak berada persis di tempat antrean. Ia menunggu di sebelah kanan barisan. Menunggu namanya dipanggil.

Bagi Oni yang merupakan tunadaksa, tak bisa berbuat banyak. Keadaan itu tentu membuat ia kesulitan dalam setiap membutuhkan pelayanan publik.

"Ini baru satu tempat mas. Belum lagi kalau soal mau buang hajat. Kami sih malu karena kita yakin hampir semua dinas di Cirebon belum menyediakan kamar mandi khusus disabilitas," keluh Oni.

Bukan hanya itu, Oni juga mengaku sering

menghadiri beberapa acara yang diadakan dinas. Sebagai orang yang memiliki keterbatasan, ia kesulitan karena tidak ada fasilitas khusus disabilitas di kantor tersebut.

"Saya pernah menghadiri acara di kantor bupati, di sana kan belum ada *lift* atau akses disabilitas. Jadi kami kesulitan untuk bergerak, sedangkan acara ada di lantai 2," ungkap Oni.

Setiap aktivitas apapun Oni mengandalkan 2 tongkatnya, semenjak kedua kakinya harus diamputasi. "Sudah 22 tahun tongkat ini menemani saya," ujarnya.

Apa yang dialami Oni, tentu menjadi preseden buruk dan bukti belum berjalannya hak keadilan

bagi para penyandang disabilitas. Padahal Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak mereka.

Salah satunya dalam Pasal 19 yang menegaskan, penyandang disabilitas mendapat hak pelayanan publik meliputi: memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi; pendampingan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melaporkan, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon mencapai 3.365 jiwa pada tahun 2022. Jumlah tersebut diperoleh dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon dengan ragam kategori.

“Itu data yang sudah kami terima meliputi disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual,” ujar Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Cirebon Lili Marliyah, AKS.

Seperti diketahui, UU No 8 Tahun 2016 menerangkan ragam disabilitas fisik yaitu seseorang yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf. Sementara disabilitas sensorik, merupakan individu yang mengalami keterbatasan pada fungsi alat indera, seperti penglihatan dan pendengaran.

Lalu disabilitas mental adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Terakhir disabilitas intelektual adalah individu yang mengalami gangguan pada fungsi kogni-



Lili Kabid Rehsos

tif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.

Lili menjelaskan, disabilitas tidak hanya berlaku karena bawaan lahir, melainkan juga disebabkan kecelakaan yang mengakibatkan amputasi atau trauma pada mental. Atau karena penyakit seperti kusta dan diabetes melitus.

Tak heran, dengan alasan tersebut, diperkirakan jumlah penyandang disabilitas akan selalu bertambah dalam setiap tahun.

“Setiap hari berapa banyak orang mengalami kecelakaan. Setiap hari berapa banyak orang terkena penyakit. Maka, bisa disimpulkan penyandang disabilitas kemungkinan akan selalu bertambah,” jelasnya.

Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas umum untuk menunjang aktifitas penyandang disabilitas. Fasilitas umum dan layanan publik di Kabupaten Cirebon dinilai belum ramah disabilitas.



Lili mengakui, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Dia menuturkan, sejumlah komunitas disabilitas mengeluh terkait penyediaan akses disabilitas yang kurang memadai.

“Memang itu menjadi masukan dari komunitas-komunitas disabilitas ke pemda, agar lebih banyak diberikan fasilitas yang berpihak kepada mereka,” tuturnya.

Beberapa komunitas merasa kesulitan ketika ingin melakukan aktifitas seperti bekerja, atau sekadar berkunjung ke saudara. Padahal, dengan jumlah disabilitas tersebut maka semestinya diimbangi dengan pengadaan akses yang memadai. Tak hanya di ruang pelayanan publik milik

daerah, fasum seperti masjid dan musala pun dianggap belum ramah disabilitas.

“Kami sering dengar keluhan dari penyandang disabilitas yang kesulitan saat ambil wudu atau ke kamar mandi di masjid atau musala,” ungkap Lili.

Belum lagi pada sektor transportasi umum dan kesehatan, yang minim akses khusus penyandang disabilitas. Bahkan di tingkat kantor pemerintahan masih banyak dinas yang tak memiliki ruang MCK disabilitas.

“Dinsos dulu memang pernah ada, berupa kamar mandi dan akses di pintu masuk untuk disabilitas. Tapi karena sempat mengalami pembangunan baru jadi tidak terawat lagi,” bebarnya.

Sejauh ini, Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memiliki ruangan dan pelayanan khusus disabilitas baru Pengadilan Negeri Sumber dan Disdukcapil. Sementara desa yang dinilai sudah terbuka dengan menyediakan akses disabilitas, di antaranya, Desa Kendal, Durajaya, Panambangan, dan Desa Gempol. Selebihnya nihil.

Menurut Lili, keberadaan fasilitas umum dan pelayanan publik khusus disabilitas sangat dibutuhkan. Hal tersebut pun diakui menjadi tugas seluruh elemen bukan hanya kewenangan satu bidang atau Dinsos saja.

“Ini memang menjadi PR, bagaimana kedepan fasilitas umum dan pelayanan publik ramah disabilitas. Jadi harus ada sinergitas SKPD dulu,” katanya. •Par



#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Luthfi: Perlu Komitmen Penuhi Hak Kesetaraan Disabilitas

Selain sulit mendapat pelayanan publik, para penyandang disabilitas juga tak dapat pekerjaan layak. Mengapa terjadi?



foto: amh/dk

Sudah 1 jam lamanya, Oni Jahoni berdiri di pinggir jalan. Menunggu angkutan umum datang. Oni berencana pergi ke satu tempat. Terkadang ia harus menunggu berjam-jam. Tak jarang, penyandang tuna daksa itu harus berjalan kaki karena nihilnya angkutan umum yang berhenti.

“Mungkin para angkutan tidak mau repot dan makan tempat. Apalagi saya yang bawa 2 tongkat,” anggapnya.

Oni terpaksa menjadi tuna daksa setelah kehilangan kedua kakinya 22 tahun silam. Oni merupakan korban tabrak lari saat berusia 23 tahun.

“Lebih tepatnya terjadi di tahun 2001, sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang nabrak saya. Setelah amputasi, hampir 4 tahun saya menutup diri karena malu,” tuturnya.

Laki-laki asal Desa Durajaya, Kecamatan Greged, ini menilai, fasilitas umum dan pelayanan publik di

Kabupaten Cirebon belum ramah terhadap disabilitas. Hal itu bisa dilihat dari sulitnya akses pelayanan publik yang belum memiliki keadilan bagi penyandang disabilitas. Keadaan itu diperparah karena tidak hanya terjadi dalam fasum, melainkan juga area kantor pemerintahan.

Oni mengaku, beberapa kali diundang dalam kegiatan bertemakan penyandang disabilitas. Namun justru ia mengalami kesulitan.

“Saya pernah menghadiri acara di kantor bupati. Saya merasa kerepotan, karena di sana belum ada lift atau akses disabilitas. Sementara, acaranya di lantai 2. Saya terpogoh-pogoh,” ungkap Oni.

Selain minimnya pelayanan publik ramah disabilitas, Oni juga kesulitan mendapat pekerjaan. Untuk membiayai hidupnya, Oni bergantung dengan berjualan sayur di Pasar Durajaya. Setiap pukul 3 pagi, Oni dan istri akan berangkat menuju pasar



menggunakan motor dan viar roda tiga yang telah dimodifikasi untuk mengangkut sayuran. Tak ada pilihan lain bagi Oni selain harus berwirausaha.

Selain Oni, penyandang tuna rungu Reza Mantovani, juga merasakan hal sama. Laki-laki 23 tahun tersebut, kesulitan mendapat pekerjaan. Meski sudah mengantongi ijazah SMA SLB Bina Mandiri Ciledug, tak membuatnya mudah mendapat pekerjaan layak. Saat ini, Reza bekerja sebagai pembantu sekolah. Sese kali ia juga menjadi tukang bangunan.

“Sulit cari kerja, jadi diajak sama kepala sekolah untuk bantu-bantu di sekolah sampai nanti dapat kerjaan tetap,” katanya, dengan menggunakan bahasa isyarat.

Laki-laki yang hobi melukis itu, sempat berkeinginan bekerja di perusahaan besar. Namun Reza tak dapat berbuat banyak. Keterbatasannya membuat ia

memendam keinginan itu.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengungkapkan telah membentuk Unit Layanan Disabilitas yang bertugas memenuhi hak disabilitas sebagaimana amanat undang-undang.

“Sebagaimana amanat PP Nomor 60 Tahun 2020, unit itu bertugas membekali para disabilitas agar memiliki semangat yang tinggi saat memasuki dunia kerja,” ungkap Novi.

Meski demikian, Novi mengakui, baru 81 penyandang disabilitas yang telah mendapat pekerjaan layak. Mereka tersebar di 18 perusahaan, bahkan 27 di antaranya, telah bekerja di perusahaan waralaba.

Novi menyebut, alasan belum semua disabilitas terserap lapangan pekerjaan, karena banyak yang memilih mengundurkan diri. Padahal banyak perusahaan yang sudah memfasilitasi penyandang

disabilitas untuk bekerja.

“Tapi tidak sedikit yang memutuskan mengundurkan diri dengan alasan tidak percaya diri,” jelas Novi.

Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) Abdul Mujib menilai, belum ada ketegasan hukum dalam pembinaan penyandang disabilitas. Tak heran banyak pekerjaan rumah yang tak selesai. Selain itu, Mujib juga menilai Pemkab Cirebon tak memiliki data riil jumlah penyandang disabilitas. Padahal data menjadi kunci agar kesejahteraan penyandang disabilitas dapat terwujud.

“Saya pernah membuat acara di desa, lalu pihak desa mengatakan cuma ada 2 orang disabilitas. Padahal saat saya lakukan pendataan ulang satu desa mencapai 30 bahkan ada yang 60 orang,” jelasnya.

Mujib berharap, Pemkab Cirebon benar-benar menghadirkan kesetaraan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengingatkan, pentingnya pemberdayaan penyandang disabilitas. Dalam UU Nomor 8 tahun 2016 sudah dijelaskan, penyandang disabilitas memiliki hak pendampingan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya.

Luthfi menegaskan, penyandang disabilitas memiliki hak sama untuk berkontribusi dalam membangun Cirebon. Maka, perlu fasum dan kesempatan bekerja yang setara.

“Mereka semua tentu bagian dari Kabupaten Cirebon. Memiliki hak yang sama untuk mendapat akses. Maka jangan sampai dipandang sebelah mata,” tegas Luthfi. •par

Inisiasi Raperda Pemenuhan Hak Disabilitas

Komisi IV menilai, program pemberdayaan penyandang disabilitas belum optimal dan menyeluruh. Tak sebanding dengan jumlahnya terus meningkat. Apa langkahnya?



foto-foto: qusoy/kk

Dinsos Kabupaten Cirebon mengakui jumlah penyandang disabilitas selalu bertambah dalam setiap tahunnya. Kabid Rehabilitas Sosial Dinsos Kabupaten Cirebon Lili Marliyah mengungkapkan, Dinsos telah berupaya menyediakan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perlindungan dan kesejahteraan.

Lili membagi dua klaster bantuan yang berbeda antara disabilitas berat lansia dan disabilitas berusia produktif.

“Golongan berat ini mencakup mereka yang sudah sangat butuh. Bentuk bantuannya sembako, nutrisi dan kesehatan,” ujarnya.

Sementara bagi penyandang disabilitas produktif bantuan yang diberikan adalah alat bantu seperti, tongkat, kursi roda, tangan palsu, kaki palsu maupun alat bantu dengar.

Selain itu Dinsos juga memberikan bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas yang berkeinginan membuka usaha.

“Kemarin sudah dilakukan, ada yang usaha isi ulang gas 3 kg. kemudian Ada juga yang ingin usaha sembako, maka kami beri bantuan berupa etalase toko,” jelas Lili.

Tak hanya itu, para penyandang disabilitas juga mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Kegiatan tersebut merupakan himbauan dari Kemensos yang bertujuan



memotivasi mereka agar lebih percaya diri.

Meski demikian, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menilai, selama ini program Pemkab Cirebon bagi penyandang disabilitas kurang menyeluruh. Tak sebanding dengan jumlah disabilitas yang mencapai ribuan.

“Pelaksanaan program sangat kurang menyeluruh. Baru sebatas bantuan fisik. Padahal komunitas disabilitas di Cirebon itu banyak. Tapi yang dapat hanya itu-itu saja,” jelas Khanafi, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.

Para penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) berharap, langkah nyata Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan solusi pelayanan publik yang ramah.

Hal itu yang menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Pada Februari 2023

lalu, DPRD menginisiasi rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai hak pelayanan disabilitas.

“Selain menjadi amanat Undang-Undang, kita ingin keberadaan penyandang disabilitas bisa terpenuhi haknya,” ungkap Khanafi.

Khanafi menegaskan, kehadiran Perda diharapkan dapat menekan eksekutif agar lebih memperhatikan nasib penyandang disabilitas secara optimal. Tidak hanya segelintir saja. Rancangan perda akan mengatur pengadaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, pelayanan publik yang memudahkan, dan *reward* bagi mereka yang berprestasi.

Selain itu, dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah berkewajiban menegaskan penyandang disabilitas mendapat kesempatan kerja maupun pekerjaan tetap di seluruh instansi.

Pemkab diharapkan berinovasi agar penyandang disabilitas dapat bekerja dan berpenghasilan. Misalnya, melalui kewajiban dinas memperkerjakan penyandang disabilitas. “Kalau itu tidak dilakukan, jangan ngomongin yang lain dulu. Pemkab saja tidak ramah. Enggak ada orang yang bisa bekerja di pemerintahan,” tegas Khanafi.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon sempat mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Beringin Bhakti di Kecamatan Talun. Khanafi mengapresiasi inovasi yang dilakukan SLB Beringin Bhakti yang berhasil memberdayakan penyandang disabilitas. Sekolah melakukan pendampingan sebelum penyandang disabilitas mendapat pekerjaan.

“Di sana kalau ada siswa SLB belum bekerja, sekolah berkorban dengan mempekerjakan mereka sampai mendapat pekerjaan tetap,” ungkap Khanafi.

Politisi Golkar itu berharap, rancangan perda penyandang disabilitas dapat segera disahkan untuk memastikan hak disabilitas terpenuhi. Saat ini DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji dan membahasnya.

“Kita bisa meniru hal kecil dari SLB Talun. Kalau perda sudah disahkan setidaknya bisa begitu. Sekarang masih tahap pembahasan. Mudah-mudahan secepatnya bisa disahkan,” kata Khanafi. •Par

Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC): Perda Hak Disabilitas Sudah Kami Idamkan

DPRD menginisiasi Perda Pemenuhan Hak Disabilitas sebagai bentuk komitmen dukungannya terhadap kesetaraan dalam bermasyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dan harapan penyandang Disabilitas. Reporter Cirebon Katon mewawancarai Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon Abdul Mujib. Berikut petikannya:



Bagaimana tanggapan Anda mengenai pelayanan publik di Kabupaten Cirebon bagi forum penyandang disabilitas?

Secara keseluruhan saya rasa belum semua dinas memiliki fasilitas yang memihak pada disabilitas. Kalau pun ada, tapi belum sesuai standar untuk penyandang disabilitas. Saya juga tidak tahu, mungkin mereka menganggap penyandang disabilitas tidak mungkin datang sendiri ke kantor dinas.

Tapi saya juga mengapresiasi kepada beberapa dinas dan instansi yang sudah mau melakukan perubahan, seperti di Dis-

dukcapil. Ketika penyandang disabilitas butuh perekaman e-KTP, mereka lakukan jemput bola. Lalu di Disnaker juga sudah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD), saya tidak menghilangkan upaya mereka, tapi semoga dinas lain juga akan sama melakukan hal serupa.

Bagi saya, keberadaan fasilitas umum yang memiliki standar penyandang disabilitas juga akan memberi kemudahan bagi orang normal. Misalkan yang punya bawaan banyak, atau perempuan yang sedang hamil besar, dan orang tua yang sulit

berjalan.

DPDR berencana membuat Perda khusus disabilitas, apa tanggapan Anda?

Saya mewakili Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) mengucapkan terima kasih, kepada pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, karena telah berinisiatif untuk membentuk peraturan daerah mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kami bersama teman-teman di FKDC juga mengapresiasi dan menyambut baik rencana pembentukan Perda ini. Kami



merasa senang karena dengan adanya inisiasi ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas.

Sebenarnya dari dulu kami sudah mengidamkan perda ini. Sejak 2014, kami menyuarakan keinginan kami melalui media pentingnya payung hukum yang mengatur penanganan dan partisipasi penyandang disabilitas.

Kami mengakui tidak bisa untuk mengusulkan pengadaan perda secara langsung. Maka selama ini kami menyuarakan hanya melalui media dan acara-acara tertentu saja.

Saat tahun 2022, Kang Luthfi sendiri sempat berkunjung ke sekretariat kami, salah satunya untuk membicarakan pembentukan Perda Pemenuhan Hak Disabilitas. Saya merasa senang karena beliau bersedia turun langsung untuk mengetahui kondisi yang dirasakan dan dibutuhkan oleh kami.

Seberapa penting Perda Pemenuhan Hak Disabilitas?

Jika melihat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon yang mencapai 3000

sampai 4000 jiwa, keberadaan Perda ini sudah sangat penting.

Bahkan angka itu bisa bertambah, karena disabilitas bukan hanya didasari kelainan sejak lahir, tapi juga karena penyakit dan peristiwa kecelakaan. Sedangkan hampir setiap hari kasus kecelakaan terjadi, dan pertahun ada 200 kasus disabilitas yang disebabkan kusta dan diabetes.

Perda ini nantinya akan menjadi dasar bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak seperti masyarakat pada umumnya. Karena sebenarnya banyak masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang ingin memberdayakan kita, seperti pihak desa atau kecamatan, tapi mereka takut menyalahi aturan karena tidak ada payung hukum yang jelas.

Apa harapan Anda terhadap rencana pembentukan Perda Pemenuhan Hak Disabilitas?

Harapan saya, Perda tersebut bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah terhadap penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon. Selain itu bisa mengentaskan permasalahan stigma mas-

arakat yang masih banyak melihat kami sebelah mata.

Kehadiran perda juga berpotensi mendorong pemerintah daerah memaksimalkan penyediaan pelayanan publik dan fasilitas umum yang ramah disabilitas.

Selain itu dengan adanya perda akan menggugah semangat pemerintah daerah untuk mendata jumlah penyandang disabilitas secara maksimal. Saya pernah melakukan acara di desa-desa, ketika meminta data disabilitas cuma ada 2. Sedangkan ketika saya melakukan pendataan ulang, ternyata terdapat 30 bahkan sampai 60 orang.

Hal yang paling penting, harapan saya ketika perda sudah disahkan ada implementasi yang optimal dari pemerintah daerah. Karena jika sudah memiliki Perda tapi tidak diimplementasikan sama saja bohong, dan Kabupaten Cirebon akan jauh dari kalimat ramah disabilitas.

Apa yang akan dilakukan FKDC kedepan?

Sejauh ini kami memiliki sejumlah kegiatan, di antaranya ada bimbingan konseling terhadap penyandang disabilitas agar optimistis dalam menjalani hidup.

Kegiatan yang kedua sosialisasi terhadap masyarakat melalui desa-desa. Tujuan kami untuk membentuk stigma masyarakat yang lebih baik lagi terhadap penyandang disabilitas. Hampir seluruh desa di Kabupaten Cirebon sudah kami sosialisasikan.

Kami juga memiliki beberapa kegiatan usaha, seperti jahit, *handcraft*, daur ulang sampah, dan banyak lagi. Setelah terbentuknya perda, kami akan memiliki ruang untuk melakukan pengembangan bekerjasama dengan pemerintah daerah agar Cirebon bisa ramah disabilitas. •par

Tinjau Peningkatan Jalan Winong-Jemaras Kidul

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon meninjau proses perbaikan jalan di ruas Jalan Winong hingga Jemaras Kidul. Kegiatan peningkatan jalan ini juga berbarengan dengan 31 ruas jalan di Kabupaten Cirebon yang tengah diperbaiki. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Iwan Rizki mengatakan, di tahun ini Dinas PUTR hanya bisa memperbaiki jalan sepanjang 48 KM diawali tahap 1.

“Karena untuk tahun ini Dinas PUTR Kabupaten Cirebon tidak *tersupport* anggaran dari provinsi maupun APBN. Tahun ini ada 4 tahap. Pertama di 31 titik strategis. Nanti tahap 2 sebanyak 150 titik,”

ungkapnya.

Iwan menerangkan, Pemkab Cirebon menargetkan seluruh ruas jalan yang rusak akan diperbaiki pada 2024 mendatang. Pemkab Cirebon telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR mengusulkan perbaikan jalan di tahun 2024 melalui Inpres, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan provinsi.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana mengingatkan agar lelang perbaikan jalan dapat segera diselesaikan. “Karena kalau tahap lelang lama, maka yang terjadi keterlambatan perbaikan,” tegasnya.



foto: foto: amir/ck

Pastikan Pilwu 2023 Berjalan Lancar Sesuai Tahapan

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan terhadap desa-desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu (Pilwu) serentak di tahun 2023. Salah satunya di Desa Gebangilir, Kecamatan Gebang.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan berharap, agar akhir masa jabatan kuwu tidak meninggalkan permasalahan di kemudian hari. Kuwu yang akan berakhir masa jabatannya harus sudah menyelesaikan segala bentuk laporan pertanggungjawabannya kepada Inspektorat.

“Baik kuwu tersebut akan mencalonkan kembali ataupun tidak,” ujar Sofwan.

Politisi Gerindra tersebut mengatakan, tahapan Pilwu harus tetap berjalan sebagaimana Perbup maupun Undang-Undang (UU) tentang Desa yang berlaku sekarang.

“Apalagi Pilwu serentak 2023 ini berdekatan sekali dengan Pemilu 2024. Kita berharap Pilwu tetap berjalan lancar dan tertib. Kita akan awasi terus desa-desa,” kata pria yang biasa disapa Opang itu.



Hantaran Pertanggungjawaban APBD 2022

DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna hantaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana tersebut pun dihadiri bupati dan wakil bupati, Forkompimda serta unsur organisasi perangkat daerah (OPD)

Rudiana menjelaskan, setelah menerima naskah hantaran bupati, tahap selanjutnya akan dibahas di masing-masing komisi bersama mitra kerja. Setelah itu, akan dibahas Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon.

“Hantaran ini kita nanti akan dibahas kembali. Apakah sudah sesuai capaian dan pelaksanaan APBD 2022 itu,” kata Rudiana.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron M Ag menyebut banyak poin pada naskah yang telah dihantarkan ke DPRD. Namun secara garis besar, capaian dari masing-masing OPD telah melebihi target meski ada pula yang tak memenuhi.

“Hantaran ini secara garis besarnya ada beberapa yang melebihi target pencapaian. Walaupun ada juga yang kurang, tapi masih dalam standar kewajaran. Yakni di angka 90 persen ke atas,” ungkap Imron.



foto: foto: amh/ck

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Pentingnya Keseriusan Wujudkan Cirebon Bebas Sampah

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H. Mohamad Luthfi, S.T., M.Si. menghadiri kegiatan peringatan hari lingkungan hidup sedunia. Acara yang berlangsung di taman parkir Sumber tersebut turut dihadiri Bupati Cirebon, Forkompimda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menekankan, pentingnya kesadaran seluruh elemen dan setiap pemangku kebijakan, agar lebih serius menjaga lingkungan demi terwujudnya Kabupaten Cirebon bersih dan bebas sampah.

“Kami di DPRD selalu mendorong agar warga Kabupaten Cirebon lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan,” ujar Luthfi.

Menurutnya, produksi sampah di Kabupaten Cirebon mencapai 1.200 ton per hari, yang didominasi sampah non-organik 65 persen. Sisanya adalah sampah organik yang dihasilkan limbah rumah tangga. Hal tersebut, kata Luthfi, perlu ditanggapi serius. “Peringatan hari lingkungan hidup tahun ini, harus jadi gerakan bersama agar kita sama-sama serius mewujudkan Cirebon bebas sampah. Setuju,” kata Luthfi.



Butuh PJU di Jalan Belawa

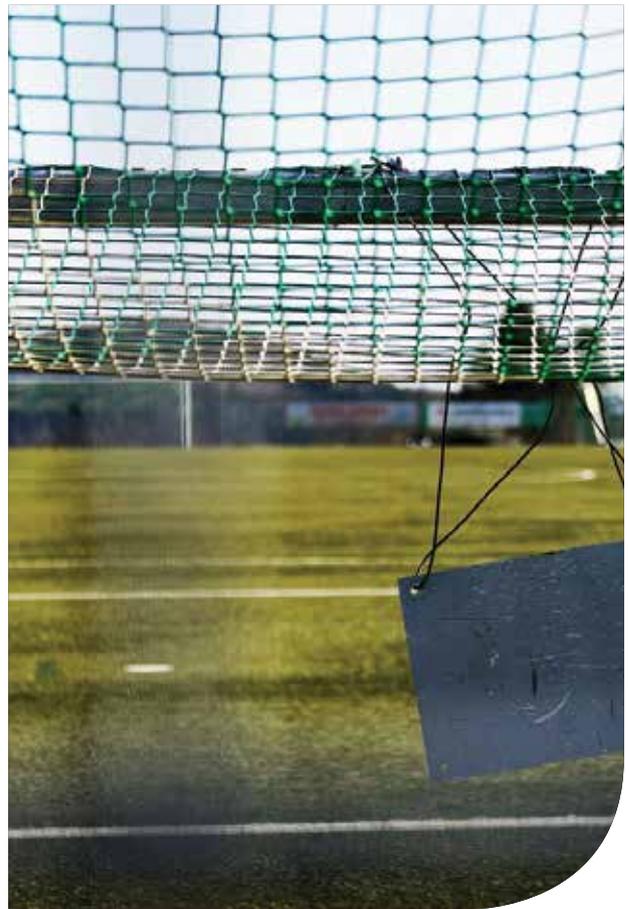
Assalamu'alaikum Wr Wb.

Saya ingin melaporkan kondisi jalan di Desa Belawa hingga Desa Wangkelang. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) ditambah permukaan aspal yang kurang baik membuat waswas pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut.

Terlebih jika dilihat, kontur tanah yang berbukit dengan medan naik turun dan berkelok membuat banyak warga enggan melewati jalan tersebut saat malam hari. Meski belum ada laporan adanya kriminalitas, namun bagi saya sangat rawan kejahatan.

Menurut saya, sudah seharusnya sarana penunjang keamanan seperti PJU, pagar pembatas, cermin tikungan serta sarana lainnya disediakan. Agar para pengguna jalan merasa lebih aman dan siaga ketika melintasi jalur tersebut.

Mengingat saat ini, Desa Belawa sudah menjadi desa wisata, maka sudah seharusnya ditunjang dengan infrastruktur jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan.
(Rahmat/Sindang/Mahasiswa)



Keluhkan GOR Desa Tak Terawat

Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon, semoga senantiasa diberi kelancaran dalam menjalankan tugas. Sebelumnya perkenalkan saya Aziz, asal Desa Kepunduan, Kecamatan Dukupuntang. Saya ingin melaporkan kondisi gelanggang olahraga (GOR) Desa Kepunduan yang terbengkalai.

Keadaan tersebut, tentu sangat disayangkan mengingat fasilitas di GOR cukup lengkap, mulai dari lapangan futsal, volly, hingga basket.

Tidak berfungsinya fasilitas olahraga tersebut, berimbas pada vakumnya kegiatan olahraga yang biasa diramaikan oleh muda-mudi desa.

Kurangnya perawatan, serta ketidakseriusan pemerintah desa dalam mengelola serta merawat fasilitas tersebut menjadi penyebab. Semoga kedepan ada upaya untuk kembali memfungsikan fasilitas GOR tersebut. Terima kasih Cirebon Katon berkenan menerbitkan.

Ratusan Sapi Terserang Penyakit

Masih segar diingatan kita, kasus ribuan ekor sapi yang terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Cirebon, pada pertengahan 2022 yang lalu. Kini, masyarakat kembali digegerkan dengan kemunculan kasus Lumpy Skin Disease Virus (LSDV), atau biasa disebut oleh peternak penyakit lato-lato, yang menyerang hewan seperti sapi dan kerbau.

Virus tersebut mengakibatkan benjolan layaknya bola lato-lato di kulit hewan yang terinfeksi.

Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon pada 11 April 2023 mencatat, ada sekitar 342 ekor sapi terpapar LSD. Sapi-sapi tersebut tersebar di 28 wilayah kecamatan dan 74 desa di Kabupaten Cirebon. Meski daging hewan yang terpapar tetap dapat dikonsumsi, kejadian tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat kasus masuknya hewan terinfeksi penyakit tetap berulang.

Saya harap pemerintah dapat lebih bersikap tegas dalam menyikapi masalah ini, terima kasih.

(Hendra/Pedagang/Batembat)



Simpang Tiga Lemahabang Semrawut

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Bukan hal aneh jika melihat kepadatan lalu lintas di pertigaan Lemahabang saat pagi maupun sore hari. Saling serobot antar pengguna jalan, menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Keberadaan parkir liar, serta pedagang yang menyerobot sebagian badan jalan, dituding menjadi biang kemacetan arus di lokasi tersebut.

Selain itu, tidak tersedianya sarana lampu isyarat semakin melengkapi lalu lintas semrawut.

Kondisi tersebut diperparah oleh sikap acuh para pemilik kendaraan, yang kerap memarkir kendaraannya di sembarang tempat. Hal tersebut sering memicu insiden saling senggol antar pengguna jalan.

Saya berharap, disediakan sarana lampu lalu lintas agar pengguna jalan dapat lebih teratur. Disamping itu, dibutuhkan peran petugas yang berjaga untuk menindak para pelanggar lalu lintas yang sering kepadatan memicu kemacetan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

(Zain/Mahasiswa/Lemahabang)

Siwang Hj Munah Dulu Ditolak, Sekarang Moncer di Marketplace

Munah sempat ditolak saat pertama kali memproduksi siwang karena tak memiliki legalitas. Namun saat ini siwangnya telah melejit di seluruh pasar daring. Bagaimana bisa?



foto-foto: dok pribadi

Jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon, jangan lupa cicipi juga jajanan khasnya. Banyak kudapan lokal warga Cirebon yang sudah bisa dibeli melalui toko oleh-oleh di Cirebon dan sekitarnya, salah satunya terasi bawang (siwang).

Siwang merupakan campuran antara terasi dan bawang merah yang disangrai sehingga memiliki aroma terasi yang kuat. Siwang biasa disajikan sebagai pengganti lauk oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Salah satu UMKM siwang yang telah moncer

adalah milik Hj Munah yang telah dirintis sejak 2019 silam.

“Saya mulai usaha ini dari nol sejak 2019. Awalnya sebelum saya memproduksi siwang ini saya memiliki salon rias pengantin. Ketika anak-anak saya lulus pendidikan, saya terbesit dalam pikiran untuk membuka usaha siwang,” ungkap Munah.

Bukan tanpa sebab, Munah menceritakan, sejak masih sekolah, ibunya selalu menyediakan siwang setiap kali Munah akan makan. “Pokonya kalau siwang ibu saya itu enak. Sampe gak perlu lauk lain,”



ungkapnya bercerita.

Akhirnya, Munah pun berani mengambil peluang dengan mulai membisiskannya. Beruntungnya, Munah tahu resep siwang milik ibunya sehingga memiliki rasa orisinal.

Namun paham resep saja nyatanya tak cukup. Munah yang kesehariannya bekerja sebagai perias pengantin sama sekali tak memiliki pengalaman bisnis kuliner. Di awal produksinya, siwang miliknya tak begitu disukai. "Saat itu saya menjual ke grup alumni SMP, tapi ternyata kurang diminati," terangnya.

Tak patah arang, Munah kembali memproduksi siwang. Saat itu ia hanya menawarkan ke

teman dekatnya. Berharap produksi keduanya bisa lebih baik. "Alhamdulillah ternyata teman saya mulai banyak yang suka, tapi saya rasa itu belum sempurna saya evaluasi lagi," jelasnya.

Setelah mengikuti banyak pelatihan usaha dari dinas maupun kementerian, Munah mengaku bertemu dengan banyak pelaku UMKM lainnya. Munah mendapat banyak pelajaran dan pengalaman inspiratif dari rekan bisnisnya.

Dengan terus semangat berbenah, Munah selalu belajar mengembangkan siwang agar dapat dikenal banyak orang. Dari satu pelatihan ke pelatihan lainnya, Munah belajar cara pro-

duksi, branding, pemasaran.

"Sebelum kenal pelatihan UMKM, saya pernah ditolak toko ketika ingin memasukan siwang karena belum ada legalitas. Tapi setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, akhirnya saya bisa melengkapi legalitas dan persyaratan sehingga produk yang saya buat diterima di toko-toko," tuturnya.

Saat ini, Siwang Hj Munah telah bertengger di toko oleh-oleh khas Cirebon dan *marketplace*. Beberapa jenis siwang produk Munah antara lain triwang, rebon bawang, bawang goreng dan bumbu empal. Untuk harganya dibanderol mulai Rp 20 ribu hingga Rp 35 ribu.

Dalam sekali produksi, Munah membutuhkan 20 kilogram bawang merah. Untuk 300 gram siwang menghabiskan 1 kg bawang merah. Bawang merah yang diolah siwang didatangkan dari Sumenep.

"Karena bawang sumenep itu termasuk bagus untuk digoreng dan punya tingkat kerenyahan baik saat digoreng," ucap Munah.

Meski terkadang harga bawang fluktuatif, Munah tetap menjaga kualitas dan harga siwang. Jika bawang mengalami kenaikan harga, Munah memilih mengurangi jumlah netto dibanding harus mengganti bawang yang jelek.

"Demi rasa dan kualitas, saya lebih baik mengurangi jumlah siwang dengan harga tetap. Sehingga pelanggan tetap bisa merasakan dan itu pelajaran dari pelatihan UMKM," ungkap perempuan asal Desa Dawuan, Tengahtani itu.

Seperti diketahui, Siwang Hj Munah telah dikenal dan mudah didapatkan di berbagai platform daring seperti Grab, Bukalapak, Tokopedia, Shoppe, Lazada dan lain-lain. • **Sandra**



foto-foto: qusoy/ck

Spirit Syukur Istikamah

Belum juga kumandang takbir menggema sebagai penanda hari raya Iduladha tahun 2023, ratusan warga sudah berduyun-duyun memenuhi halaman masjid.

Di depan Masjid Mu'tamarul Huda, Desa Bode Lor, Kecamatan Plumbon, tampak ratusan hewan kurban sudah diikat. Menjadi tontonan tahunan.

Setiap hari raya kurban, desa ini hampir tak pernah absen menjadi peraih kurban terbanyak. Dan secara otomatis menjadi magnet wisata dadakan

bagi warga sekitar.

Tahun ini, ada sekitar 30 ekor sapi dan 71 ekor kambing yang berasal dari para dermawan. Hewan-hewan itu kemudian akan dipotong esok hari selepas salat Iduladha, dan dibagikan ke seluruh warga.

"Ini merupakan spirit kami untuk senantiasa mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan pencipta dengan istikamah berkurban," ujar seorang dermawan. •Mir





Asep Pamungkas

Dari Penyuluh Pertanian hingga Sekwan

Jangan puas dengan apa yang kamu sudah digapai sekarang. Kalimat itu yang senantiasa menjadi motivasi Asep terus berjuang hingga menghantarkannya menjadi sekwan. Bagaimana kisah lengkapnya?



bunya bingung saat akan menamakan sosok satu ini. Bak kehabisan stok nama, karena sudah belasan anak yang telah dilahirkan. “Ibu saya Hj Enti Sutina bingung memberi nama saya apa. Karena sudah sebelas anak yang ia beri nama. Akhirnya ibu saya milih, yaudah Asep aja,” ungkap Asep Pamungkas menceritakan.

Pilihan nama tersebut bukan tanpa sebab. Ibunya menduga, Asep akan menjadi anak bungsu.

Nama Asep merupakan ciri khas Sunda, sementara “Pamungkas” bermakna “terakhir”. “Tadinya saya dikira bakal terakhir, ternyata ibu saya punya anak lagi. Biasanya tukang becak, tukang kredit namanya Asep juga. Cuma saya ada tambahan Pamungkas, biar kerenan dikit,” ujarnya berkelakar.

Saat ini, Asep menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon. Sebelum ia berkarir di pemerintahan, pria kelahiran Cirebon 1965 ini sempat ber-



cita-cita menjadi dokter. Ia pun berencana kuliah di Akademik Telkom. Namun harapan itu pun harus sirna karena lagi-lagi keluarga Asep tak ada biaya. Terlebih Asep memiliki belasan saudara yang juga tengah menempuh pendidikan.

“Ayah saya seorang pegawai Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJAK). Bayangkan saja gaji yang tidak seberapa harus membiayai 11 anaknya yang semuanya kuliah,” tuturnya.

Asep akhirnya memutuskan untuk mencoba tes di Insitut Pertanian Bogor (IPB). “Kalau ayah saya punya uang, saya tidak mau kuliah di dunia pertanian. Saya sempat uring-uringan tidak mau kuliah di IPB. Hati saya benar benar tidak betah,” keluhnya saat itu.

Pasca menyandang gelar sarjana, Asep lebih dahulu bekerja menjadi penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Dinas Pertanian hingga tahun 1993.

Empat tahun bekerja di pen-

yuluh pertanian, nasib baik menghampiri Asep saat ia diberi kesempatan mendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan akhirnya terpilih. Ia lalu melanjutkan kuliah pertanian di Unswagati Cirebon.

Baginya, pekerjaan adalah sebuah pelajaran baru. Ia tidak pernah menolak pekerjaan apapun yang diberikan pimpinannya. Asep sangat bersungguh-sungguh dan menunjukkan loyalitasnya. Tak heran, Asep merupakan satu satunya penyuluh pertanian yang berpangkat Eselon IV di jajaran Dinas Pertanian.

Pada tahun 2007, anak ke 10 dari sebelas bersaudara ini, dipindahtugaskan menjadi Kepala Bidang Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BPPK) hingga tahun 2011.

Karir Asep terus berlanjut, di tahun 2014, Asep dinobatkan menjadi Kepala Bidang Ketahanan Pangan. Empat tahun berselang, ia dicalonkan seba-

gian Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Dalam waktu singkat, kakak dari Ucu Rahayu ini juga pernah menjabat Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon pada September 2018 silam.

Dua tahun berikutnya, ia diamanahi mendampingi bupati sebagai staf ahli. Namun malang saat karirnya mulai naik, ia mendapati kabar putrinya mengidap Auto Imun Lupus, dan tak berselang lama wafat. Hal ini membuatnya sangat terpuruk, namun Asep berusaha untuk bangkit kembali.

“Saya sedih sekali waktu itu. Di saat karir saya mulai naik, anak saya dipanggil Allah. Tapi saya tidak boleh sedih terus,” jelasnya merenung.

Setahun menjabat staf ahli, Asep kembali dipindahkan menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon setelah mendapat kepercayaan dari Bupati Cirebon. “Bupati bilang kalau yang mengang pertanian itu, yang basicnya harus dari pertanian,” ungkapnya menirukan.

Tidak lama menjadi Kepala Dinas Pertanian, Asep kembali dipercayai untuk mengurus segala administrasi legislator dengan menjadi Sekretaris Dewan. Meski sempat kaget, namun Asep sangat bersyukur atas kepercayaan dan amanah tersebut.

“Tidak termimpikan oleh saya kalau bakal menjadi Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon. Allah memang maha segalanya,” jelasnya terkagum.

Bagi Asep, apa yang diraihinya tidak lepas dari daya juang saat masih muda. Ia pun menaru harapan agar anak muda tidak kehilangan daya juang dan selalu memanfaatkan waktu dengan baik. “Karena masa masa depan harus diperjuangkan,” katanya. •ADV

Dwiyani Pratamawati, SH

Karirnya Dimulai Sejak Magang

Profesionalitas dan ketekunan menjadi kunci bagi Dwi dalam bekerja. Tak heran kini ia dipercaya menjadi Kasubag Kepegawaian di Setwan. Bagaimana perjalanan karirnya?



foto: amir/dk

Manis pahit bekerja di pemerintahan, telah ia rasakan saat masih duduk di bangku perkuliahan. Dwiyani memulai karirnya dengan menjadi staf di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon. “Saat itu saya berusia 19 tahun dan sedang kuliah semester 5,” ungkapnya.

Selama magang itu, pemilik nama lengkap Dwiyani Pratamawati itu mendapat tugas menjadi protokoler. Menyiapkan segala kebutuhan teknis untuk kelancaran rapat dan kesekretariatan.

Kepiawaiannya mengemban tugas tersebut, membawanya kembali dipercaya pasca lulus kuliah untuk kembali bekerja di sekretariat daerah.

“Akhirnya saya kembali bekerja pada 2007. Saat itu masih honorer tapi saya nikmati,” jelasnya.

Menjadi protokoler, mengharuskan Dwi sapaannya, mengetahui seluruh jadwal kegiatan Setda. Dia harus berperan aktif memfasilitasi serta mengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dwi juga bertugas memantau dan mengevaluasinya.

Tak kurang dari 12 tahun, perempuan kelahiran Cirebon itu menghabiskan waktu di setda. Baru pada tahun 2019, Dwi dipindahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon.

Dwi dipercaya menjabat Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten



foto: dok pribadi

Cirebon. Tak lama ia dimutasi menjadi Kasi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Sosial. Bertugas membantu bupati dalam urusan bidang sosial. Bidang tersebut, membuatnya semakin paham terhadap kondisi sosial masyarakat Kabupaten Cirebon.

Salah satu tugasnya, Dwi harus memastikan masyarakat mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun

(JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Dwi mengaku sangat menikmati jabatannya karena merasa senang dapat membantu masyarakat. Terkadang Dwi harus merelakan hari libur untuk tetap bekerja saat kondisi mendesak.

“Iya hari libur juga harus siap, jika ada jadwal kunjungan kerja atau acara tertentu. Saya tidak apa-apa karena memang itu tanggung jawab di bidang sosial,” jelasnya.

Tiga tahun berkulat dalam bidang sosial, Dwi lalu dipindahkan untuk bertugas di Dinas

Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon. Beruntungnya Dwi cepat menyesuaikan diri dengan tugas barunya.

Ia bertugas di Sub Bagian (Subag) Keuangan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, serta menyusun data dan informasi kepegawaian.

Belum genap setahun, Dwi kembali dipercaya untuk mengemban jabatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian hingga saat ini.

Bagi Dwi, semua jabatan dan profesi sama saja. Profesionalitas, ketekunan dan tanggungjawab adalah kunci yang dapat menghantarkan kesuksesan di kemudian hari. Maka apaun profesinya harus dijalani dan dinikmati.

“Menurut saya setiap profesi itu sama, tidak bisa diremehkan. Kalau kita menekuninya dan bertanggungjawab, saya yakin akan berbuah baik dikemudian hari,” kata Dwi

Benar saja. Berkat ketekunan dan profesionalitasnya dalam bekerja, Dwi yang dulu mahasiswa magang kini adalah pejabat di Sekretariat DPRD.

Di tengah kesibukannya, kemampuan yang bertempat tinggal di Desa Sutawinangun itu tak lalai dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang baik. Dwi tetap menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan anak-anaknya.

Setiap hari libur, Dwi lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Baginya dengan bertemu keluarga bisa membangkitkan semangat dalam bekerja di esok hari.

“Sabtu dan Minggu saya di rumah bersama keluarga. Olahraga bersama, atau liburan bersama, biar nanti saat *weekday* semangat lagi,” katanya. •par

Jelang Pilwu Serentak 2023 Laporan Keuangan Desa Harus Selesai

Komisi I berharap seluruh desa dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan program desa. Jangan sampai jadi temuan di kemudian hari.



Jelang Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2023, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang.

Sejumlah empat desa di Kecamatan Dukupuntang dikabarkan bakal melaksanakan Pilwu pada Oktober 2023 mendatang, salah satunya Desa Sindangjawa.

Keempat desa tersebut pun telah diperiksa inspektorat sebagai syarat menyelenggarakan Pilwu, untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kuwu Desa Sindangjawa Kasturi mengatakan, persiapan Pilwu serentak telah disiapkan secara matang. Ia pun menunggu arahan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon.

"Kita bersama teman-teman BPD masih menunggu arahan dari Pemkab Cirebon untuk kelanjutan

Pilwu," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pilwu serentak dikabarkan mundur pasca DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu klausul yang ramai dibahas mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun. Meski demikian, Bupati Cirebon akhirnya memutuskan Pilwu serentak 2023 bakal tetap digelar sesuai jadwal.

Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Tarseni menyampaikan tujuan kunker ke Desa Sindangjawa untuk monitoring persiapan Pilwu 2023.

Politisi Demokrat tersebut, mengingatkan agar seluruh kuwu yang akan berakhir masa jabatannya segera menyelesaikan pertanggungjawaban program dan penggunaan anggaran. Ia berharap, desa yang telah diaudit Inspektorat Kabupaten Cirebon

tidak mendapat permasalahan di kemudian hari.

Inspektorat Kabupaten Cirebon melaporkan telah mengundang kuwu secara langsung untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan. Pemdes pun dapat menyanggah hasil pemeriksaan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan menerangkan, pelaksanaan pilwu 2023 akan tetap menggunakan sistem TPS tersebar berdasarkan konsultasi DPMD dengan Kemendagri. Ia pun mengaku telah menyosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Pilwu 2023.

Perbup Pilwu 2023 memberi kemudahan bagi calon kuwu di antaranya: kuwu belum pernah menjabat selama 3 periode berturut-turut cukup dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai.

Selanjutnya calon kuwu tidak perlu melampirkan legalisir ijazah terbaru. Namun untuk ijazah yang berasal dari pesantren harus divalidasi ulang dengan Kementerian Agama.

Bila semula surat kesehatan wajib dari rumah sakit, melalui Perbup terbaru cukup dari fasilitas kesehatan atau Puskesmas.

Nanan menghimbau agar seluruh pengurus BPD segera membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan melantiknya dalam waktu dekat. BPD diharapkan bekerja secara optimal da-

lam mengawasi dan memantau pelaksanaan Pilwu.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rohman mengingatkan, Pilwu 2023 harus berjalan sesuai



dengan ketetapan. Ia pun berharap seluruh elemen dapat menjaga kondusifitas masyarakat.

Sebagai informasi, Inspektorat Kabupaten Cirebon akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 15 Juli 2023 dari 100 desa yang telah diaudit.

“Maka kami menghimbau kepada desa yang hendak melakukan pilwu agar tetap fokus pada persiapan pelaksanaan pilwu dan tetap berjalan sesuai aturan yang ada,” ujar Rohman. •Zak

Komisi III: Pengembang Perumahan Wajib Bantu Perbaiki Jalan

Kondisi Jalan Ki Gede Mayaguna Desa Cempaka semakin parah. Selain tak dapat anggaran pemeliharaan, hal itu juga disebabkan kendaraan yang melebihi tonase.



foto: foto: qusoy/dk

Kerusakan jalan serta jembatan di Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, dikeluhkan warga. Para warga menantikan perbaikan di awal 2023. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan

Hal itu mengakibatkan aktivitas warga terhambat, bahkan tak sedikit yang mengaku tidak nyaman dengan kondisi itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan mengaku menerima keluhan atas kerusakan jembatan yang disebabkan kendaraan besar. Juga jalan berlubang yang menjadi penghubung antara Kelurahan Kaliwadas dengan Desa Cempaka.

“Banyak warga yang menyampaikan aspirasi pada kita, terkait kerusakan jalan dan jembatan di

situ. Dan setelah kita lihat memang memprihatinkan. Jembatan rusak yang sementara diganti dengan jembatan dari kayu,” ungkap Yoga.

Politisi Hanura itu telah memantu langsung Jalan Ki Gede Mayaguna Desa Cempaka bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon. Hal itu dilakukan sebagai bentuk responnya terhadap keluhan masyarakat yang ia terima.

Yoga menilai, kerusakan jalan yang berlangsung cukup lama itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan dan jembatan yang belum optimal.

Kedua, volume kendaraan. Pasalnya, jalan terse-



but juga kerap dilintasi oleh kendaraan yang melebihi kapasitas tonase.

“Apalagi di Desa Cempaka banyak perumahan yang berdiri. Jadi bolak-balik mobil besar itu lewat sini,” jelasnya.

Hal itu serupa dengan keluhan masyarakat mengenai aktifitas kendaraan bermuatan material untuk pembangunan perumahan Trusmi yang melebihi tonase, sehingga memperparah kerusakan jalan tersebut.

Oleh karenanya, Yoga meng-

ingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemeliharaan dan peningkatan jalan, namun langkah preventif menekan volume kendaraan yang *over capacity*.

Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan menerangkan, perbaikan dan pemeliharaan Jalan Ki Gede Mayaguna Cempaka tidak masuk dalam skala prioritas tahun 2023, melainkan akan dianggarkan di tahun 2024.

“Tahun 2023 tidak ada peme-

liharaan maupun peningkatan jalan ini namun sudah kita anggarkan tahun depan senilai Rp 1,9 miliar,” terangnya.

Hal itu tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat Desa Cempaka dan sekitarnya, namun dengan begitu tetap saja warga harus bersabar untuk menikmati jalan bagus di tahun depan.

Meski demikian, Yoga tetap berharap, penanganan kerusakan jalan bisa dilakukan secepatnya. Dia mengatakan, minimal pemeliharaan bisa dilakukan terlebih dahulu di tahun 2023 melalui perubahan anggaran. Namun tetap, apakah APBD 2023 masih mampu mengcover.

Ia pun meminta agar seluruh pihak bersabar karena ada prosedur yang harus ditempuh. Terutama kesadaran masyarakat. “Sebagai pengguna jalan, kita juga harus sabar karena semua ada prosedurnya. Tidak bisa langsung gesar-geser anggaran,” jelas Yoga.

Namun Yoga tetap mendorong agar pemerintah daerah untuk gotong royong berupaya menyelesaikan masalah tersebut.

Kerusakan infrastruktur jalan menjadi isu yang belum terselesaikan. Masyarakat sudah tidak tahan dengan kondisi jalan yang perbaikannya belum menyeluruh. Bahkan ada yang rusak selama bertahun-tahun.

Yoga menilai pengembang perumahan juga memiliki kewajiban untuk membantu perbaikan jalan. Pasalnya, kerusakan jalan juga diakibatkan kendaraan bermuatan material bangunan yang melebihi kapasitas.

“Kami juga meminta pengembang perumahan turut bertanggungjawab atas kerusakan jalan yang diakibatkan lalu lintas kendaraan bermuatan material bangunan yang melebihi tonase,” tegas Yoga. •Soy

Komisi I: Desa Harus Inventarisasi Aset

Sofwan mengingatkan agar Pemdes Mertapadakulon membenahi administrasi pengelolaan aset desa agar tak terjadi konflik di kemudian hari.



Keberadaan aset desa dinilai penting sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Persoalannya, acap kali aset desa menjadi hilang karena tidak terinventarisasi maupun konflik pasca pemilihan kuwu (Pilwu).

Hal itu yang mendorong Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon berkeinginan agar desa dapat mengelola potensi desa serta menata aset desa. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan, ST mengatakan, seluruh aset desa harus tercatat secara administratif.

“Seluruh aset desa harus tercatat secara administratif, dan mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) serta sumber daya manusia (SDM) juga. Agar keberadaan dan pemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat setempat,” kata Sofwan, saat mengunjungi Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura.

Sofwan menegaskan, aset desa yang belum tertata harus segera dibenahi dan ditertibkan. Misalnya aset pasar di Desa Mertapadakulon yang telah dires-

mikan pada Januari 2022 silam.

Sofwan menyebut, keberadaan aset desa yang disewakan harus mendapat perhatian serius secara administratif. Juga pentingnya selektif dan transparansi penggunaannya. “Kontraknya harus lebih selektif lagi dengan berbagai kajian dan masukan dari berbagai tokoh masyarakat dan instansi terkait. Hal ini harus dilakukan, agar tidak ada beban serta permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.

Ia pun mengakui, penataan aset desa tidaklah mudah. Terlebih jumlah desa di Kabupaten Cirebon berjumlah ratusan. Belum lagi saat desa mengalami pergantian kuwu, tentu banyak kajian dan kebijakan kuwu yang baru.

Namun ia menegaskan, keberadaan aset desa tetap harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

“Kami berharap semua aset desa Mertapadakulon baik yang dipakai instansi pemerintah maupun



swasta harus ditata lagi. Supaya keberadaan dan pemanfaatan aset desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan dan hukum," tegas Sofwan.

Sofwan sering kali menemukan kasus aset desa yang dipakai pemerintah daerah maupun swasta tidak memiliki nota kesepahaman (*MoU*) yang jelas. Hal itu tentu akan berdampak pada PADes yang bersumber dari aset-aset tersebut.

"Meski sistem swasta tersebut memiliki kontrak, namun ternyata ada beberapa desa yang tidak ada arsipnya. Jadi kita tidak tahu kontraknya sampai kapan, dan

berapa nilainya," jelasnya

Padahal pengelolaan aset desa telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 100 Tahun 2016 Pasal 3 yang menjelaskan, pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai.

Tak jauh beda dengan Sofwan, Camat Astanajapura H Suharto pun mengakui, penataan aset desa memang ada regulasi yang harus ditaati dan semua kuwu mempunyai kewajiban untuk mematuhi regulasi itu.

"Sikap yang ditunjukkan komisi I memang tepat. Pengelolaan aset desa memang memiliki dasar hukum yang perlu ditaati, dan ini sudah menjadi kewajiban seluruh kepala desa khususnya di kecamatan Astanajapura," ujar Suharto.

Ia pun mengingatkan, agar seluruh desa menertibkan administrasi aset desa sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Kuwu Desa Mertapadakulon Suherman pun menyambut baik kunker Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon. Dia juga merasa senang atas saran dan perhatian dari Komisi I yang telah memberikan pemahaman dan pengetahuan berkenaan penataan aset desa.

"Saya senang atas kehadiran dan perhatian Komisi I. Saya bersama pemdes akan menata aset desa Mertapadakulon supaya lebih tertib lagi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," kata Suherman.

Suherman menerangkan, sudah menjadi kewajiban perangkat desa untuk memastikan kesejahteraan masyarakatnya, dengan meningkatkan PADes. Hal itu bisa diwujudkan dengan menjaga dan mengelola aset desa.

Sofwan berharap, apa yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa harus dipenuhi. Di antaranya pengelolaan potensi desa beserta administrasi aset desa. Bila aset desa ditata dengan baik, maka desa pula yang akan diuntungkan.

"Itu sudah menjadi kewajiban desa, untuk bisa menyelesaikan persoalan administrasi dan keuangan, termasuk didalamnya aset-aset desa yang perlu dibereskan," jelas Sofwan. •**par**

Dorong Peningkatan Kesejahteraan Puskesmas

Komisi IV menilai pentingnya memastikan kesejahteraan dan tata kelola Puskesmas sebagai ujung tombak data kesejahteraan masyarakat. Seperti apa?



foto-foto: dok setiawan

Di tangannya, nasib warga pra sejahtera dipertaruhkan. Melalui pendataan, verifikasi dan validasi para petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) bekerja. Karena bersentuhan langsung dengan warga, tak sedikit petugas Puskesmas yang tetap bekerja di hari libur.

“Kadang kala ada saja warga yang konsultasi BPJS di hari libur, saya tetap harus ngurus ke BPJS. Jadi petugas Puskesmas itu harus siap kapanpun. Ini baru satu belum soal bantuan lain,” ujar Rohmat Shoim, ketua Puskesmas Desa Karang Sari, Kecamatan Weru.

Meski sudah bekerja ekstra, petugas Puskesmas hanya mendapat upah ratusan ribu dalam sebulan. Hal itu yang menjadi keluhan mereka. “Ya kerjanya harus cepat di lapangan dan pendataan tapi kita cuman diupah Rp 300- Rp 700 ribu,” keluh Shoim.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengakui acap kali menerima keluhan para petugas Puskesmas perihal gaji. Pada Mei 2023 lalu, perwakilan Puskesmas Kabupaten Cirebon juga telah beraudiensi, meminta kenaikan upah.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan telah meminta Dinsos untuk lebih memperhatikan kesejahteraan petugas Puskesmas. Ia menilai, honor yang diterima petugas puskesmas tak sebanding dengan risiko dan tenaga yang dikeluarkan.

Aan mengungkapkan, dalam menjalankan tugasnya, petugas puskesmas kerap mendapat banyak tekanan dari masyarakat. Di sisi lain, petugas puskesmas hanya mendapatkan bayaran atau honor sebesar Rp 300 hingga Rp 700 ribu.

“Anggota puskesmas yang ada empat orang setiap



desa ini menjadi polemik. Mereka banyak tekanan dari masyarakat, tugasnya banyak di lapangan tapi ternyata honorinya kecil," kata Aan.

Ia pun mendorong Pemkab Cirebon agar bisa meningkatkan honor petugas puskesmas. "Bagaimana caranya untuk meningkatkan honor teman-teman puskesmas yang minimalnya Rp 500 ribu per bulan, agar kerja mereka lebih maksimal," ujar Aan.

Langkah Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon meningkatkan kesejahteraan dan tata kelola Puskesmas pun terus dilakukan dengan berkunjung ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta.

Kunker tersebut, membahas penguatan tata kelola Puskesmas. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana mengatakan, kunjungan ini menjadi penting dilakukan, mengingat fungs-

si Puskesmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga perlu koordinasi dengan Kemensos.

"Tata kelola yang baik untuk Puskesmas sangat penting, guna memastikan layanan kesehatan yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Rudiana.

Rudiana menjelaskan, penguatan transparansi informasi Puskesmas dapat mempermudah masyarakat mengetahui informasi segala jenis data kesejahteraan.

Dalam bekerja, Puskesmas harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan data misalnya melalui forum konsultasi, pertemuan, atau pembentukan kelompok advokasi kesehatan yang melibatkan perwakilan masyarakat.

Selain itu, politisi PDIP itu juga mengingatkan, pentingnya peningkatan SDM Puskesmas. Personil Puskesmas harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai dalam melayani masyarakat. Peningkatan kualitas ini bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur.

Selanjutnya pemanfaatan teknologi. Ini juga harus dilakukan guna mencapai pelayanan yang efektif, efisien dalam pengelolaan data serta pelaporan.

Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina mengatakan, penguatan tata kelola Puskesmas yang baik akan berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat.

Setelah tata kelola Puskesmas baik, maka pekerjaan selanjutnya adalah mengupayakan upah yang layak. "Ini yang sedang kita dorong melalui kunker ini. Keluhan para petugas Puskesmas semoga bisa disikapi oleh Kemensos," pungkas Siska. •Zak

Garden Ciberes

Wisata Baru yang Berdiri Saat Pandemi

Minimnya tempat rekreasi di wilayah Cirebon timur, membuat salah seorang warga Cikulak Kidul berinisiasi membangun wisata. Seperti apa?



foto-foto: dok pribadi

Sebelum pinggiran Sungai Ciberes di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled merupakan tempat yang rawan banjir, dan tidak produktif. Banyak sampah berserakan, karena rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.

Dua tahun lalu, tepatnya saat Covid tengah merajalela, Naddi Hendra Yuliestiean bersama keluarganya menginisiasi sebuah tempat wisata bernuansa alam. Hal itu pun mendapat dukungan dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dengan dibuktikan lancarnya perizinan.

Meski saat itu kondisi perekonomian tengah

terpuruk, Naddi yakin, lambat laun ekonomi akan kembali berjalan lancar. Tak ada sedikit pun keraguan saat menentukan tema apa yang cocok untuk wisata bernuansa alam tersebut.

“Saya lulusan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Jadi sudah sering bolak-balik Asia menggunakan kapal laut. Jalan-jalan adalah keseharian saya. Mulai dari Thailand, Singapura, dan wilayah-wilayah lain. Pengalaman tersebut saya jadikan sebagai dasar untuk membangun tempat wisata yang menarik,” jelas pria berusia 50 tahun itu.

Selain untuk memanfaatkan lahan yang kurang

produktif, Wisata Alam Garden Ciberes ini juga dibangun agar perekonomian masyarakat sekitar bisa meningkat. Saat ini, tidak sedikit warga yang bekerja di tempat wisata tersebut.

Fasilitas yang tersedia di Wisata Alam Garden Ciberes ini utamanya adalah kolam renang, replika-replika binatang purba, jeplugan sewu, tokoh pewayangan, saung, terapi ikan, panggung hiburan serta mini zoo. Keberadaan mini zoo disediakan agar pengunjung bisa berwisata sekaligus belajar mengenai hewan-hewan.

Selain itu, terdapat lahan seluas 1 hektare yang bisa digunakan tempat senam, rapat desa, arisan, hingga wisuda.

Wisata alam Garden Ciberes mempunyai dua sisi tempat yang terpisah oleh Sungai Ciberes. Untuk menikmati sisi tempat yang lain, pengunjung bisa menggunakan jembatan panjang, bernama jembatan cinta.

Harga tiket masuk yang dibanderol pun sangat terjangkau. Pada hari biasa para pengunjung cukup mengeluarkan uang Rp 15 ribu. Sementara untuk *weekend* Rp 20 ribu.

Wisata Alam Ciberes biasanya dipadati pengunjung saat hari-hari libur. Meski berada di tengah pedesaan, tak membuat wisata ini sepi pengunjung.

Naddi mengaku, para pengunjung yang datang bukan hanya dari wilayah Cirebon timur saja, melainkan Kuningan, Kota Cirebon dan sekitarnya.

Pria yang juga menekuni bisnis properti ini berharap, pemerintah bisa membantunya untuk membuat akses jalan menuju Wisata Alam Garden Ciberes. “Karena letaknya di tengah-tengah pemukiman. Jadi terkadang jika ada orang hajatan yang memasang tenda di tengah jalan, pengunjung



harus muter-muter untuk menuju Ciberes ini,” kata Naddy.

Naddy menerangkan, di bangunnya Ciberes Garden ini, terinspirasi dari hobinya mengunjungi obyek wisata di berbagai

daerah di Indonesia.

“Alhamdulillah pelan tapi pasti obyek wisata Ciberes Garden terus berkembang dan pengunjung selalu ramai setiap hari libur,” terangnya. •Sharla

Losari Kidul Bakal Punya Pasar Modern

Sempat mangkrak, tahun ini revitalisasi pasar akhirnya dilanjutkan. Siap-siap bakal punya pasar modern bersih nan nyaman. Seperti apa?



foto: dok pribadi

Hilir mudik kendaraan tampak sibuk saat berkunjung di desa satu ini. Tak heran, desa yang berlokasi di ujung timur Kabupaten Cirebon tersebut beriringan dengan jalan pantura.

“Karena lokasinya yang strategis, makanya kita menamakan diri sebagai Desa Metropolitan,” ujar Kuwu Desa Losari Kidul Ghafar Ismail.

Ghafar menjelaskan, Peme-

rintah Desa (Pendes) Losari Kidul berupaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat melalui pasar desa. Pasalnya, sebagian warga menggantungkan hidupnya dengan berjualan. Sehingga salah satu program unggulan desa adalah merevitalisasi pasar.

Pendes Losari Kidul tengah berusaha memperbaiki kualitas pasar, agar jual beli menjadi lebih aman dan nyaman. Perbaikan

pasar mulai dilakukan sejak 2022. Meski sempat mangkrak selama sebulan, revitalisasi pasar akhirnya dapat dilanjutkan.

“Untuk pasar, insyallah akan secepatnya ditempati. Sekarang progresnya sudah 70 persen terhitung Juni lalu. Tidak akan lama lagi pasar akan berubah lebih baik lagi,” jelas Ghafar.

Saat ditanya bagaimana tanggapan masyarakat mengenai revitalisasi pasar, Ghafar mengklaim warga sangat antusias dan gembira mendengarnya. Meski sebagian sempat mengeluh karena lambannya revitalisasi pasar.

Pria berusia 50 tahun ini meyakinkan agar masyarakat bersabar, karena pasar modern tersebut akan menjadi ujung tombak perekonomian Desa Losari Kidul. Sambil menunggu revitalisasi selesai, para pedagang ditempatkan sementara di pasar buatan yang letaknya tak jauh.

Selain pasar, kata Ghafar, layanan Pos Kesehatan Desa (Poskedes) juga menjadi program yang patut diacungi jempol, karena telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Poskedes Losari Kidul juga menjadi pos kesehatan terbaik di Kecamatan Losari, bahkan di Cirebon timur. Kita berharap desa kami bisa menjadi contoh sektor perekonomian dan pelayanan,” katanya. •Sph

Sindangjawa

Fokus Beberes Sampah

Pasca mengikuti program KotaKu, Pemdes Sindangjawa bertekad tuntaskan persoalan sampah. Apa yang dilakukan?

Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu desa yang tanggap dalam penanganan sampah. Di tahun 2023, desa tersebut akan fokus menangani sampah di desa.

Hal itu diungkapkan H Engkos Kasturi, kuwu Desa Sindangjawa. Dia mengatakan, penanganan sampah tersebut merupakan program pemerintah daerah. Gayung menyambut desa pun melakukan hal serupa.

“Program ini sebetulnya program pemerintah daerah. Sebagai bentuk dukungan saya, maka akan saya terapkan di desa saya,” kata Kasturi.

Hal itu juga didasari terdapat sejumlah sampah di beberapa titik. Dari 5 RW, volume sampah paling banyak di RW 1 dan 2. Tak heran, Kasturi sangat bersemangat untuk menyelesaikan masalah sampah.

Sebelumnya, Kasturi mengikuti salah satu program KotaKu (kota tanpa kumuh) yang diinisiasi pemerintah pusat. Saat itu Kasturi mengajukan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar.

“Program KotaKu itu dari Kementerian PUPR. Kemarin saya mengajukan untuk kawasan seluas 10 hektar di RW 1. Mungkin program ini akan berkelanjutan,” tuturnya.

Kasturi menjelaskan, selama ini penanganan sampah masih



foto: smpdri

sebatas kesadaran pribadi masyarakat dengan membakar atau menguburnya saja. Hal itu disebabkan desa belum memiliki TPS.

Sejauh ini Kasturi sudah memperbaiki jalan desa yang akan menjadi jalur armada sampah. Ia pun berencana bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon untuk pengangkutan sampah menuju TPA.

“Pada dasarnya desa kami tidak memiliki PADes, sementara titisara juga cuma 1 bahu,” ungkap Kasturi.

Meski demikian, Kasturi berhasil membangkitkan kesadaran pribadi masyarakat untuk saling gotong royong. Terbukti beberapa pembangunan berasal dari

iuran warga.

“Alhamdulillah, warga saya punya jiwa sosial yang tinggi. Pembangunan jembatan sepanjang 12 meter di RW 1 itu hasil dari iuran warga setempat, kurang lebih totalnya Rp 300 juta,” jelas Kasturi.

Sebelum berakhirnya jabatan kepala desa di tahun 2023, Kasturi ingin mendedikasikan sisa jabatannya untuk menyelesaikan masalah sampah.

Kasturi juga berharap, pengantinya akan membawa desa lebih baik dan mampu berinovasi.

“Harapan saya, kuwu selanjutnya bisa lebih baik lagi. Di Sindangjawa itu banyak potensi, semoga nanti bisa dimanfaatkan dengan lebih baik,” tutupnya. •par

Patapan

Raih Penghargaan Pembinaan UMKM

Berhasil tingkatkan UMKM warga, Pemdes Patapan diganjar penghargaan dari Disperindag. Seperti apa?



foto: dok pribadi

Tak kurang dari 80 persen warga Desa Patapan, Kecamatan Beber, merupakan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Rerata mereka menjual olahan industri rumahan.

Masyarakat Desa Patapan berhasil memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar. Lalu diolah menjadi aneka makanan maupun industri kreatif. Produk yang dikembangkan berupa terasi bawang (siwang), keripik tempe, keripik pisang, rengginang, basreng, oreg, lumpia kering. Ada juga produksi alat musik

kening, sapu dan lain sebagainya.

“Awalnya masyarakat memanfaatkan bahan yang ada di sekitaran rumah, karena memang masyarakat di sini rata-rata mencari uangnya dengan berdagang, lalu desa yang memfasilitasi,” ujar Kuwu Desa Patapan Karmadi.

Karmadi menerangkan, saat ini sudah banyak produk UMKM yang dihasilkan. Hal itu membuat Desa Patapan mendapat penghargaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Cirebon, berupa fasilitasi perizinan Sert-

ifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), sertifikat halal, Angka Kecukupan Gizi (AKG), Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan hak kekayaan intelektual (HKI).

“Para pelaku UMKM di Desa Patapan, sudah punya kurang lebih sepuluh sampai sebelas surat halal dan legalitasnya,” terang Karmadi

Para pelaku usaha juga mendapat bantuan fasilitasi kemasan produk dari Disperindag Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017.

Karmadi menjelaskan, produk-produk UMKM tersebut telah dipasarkan di pusat oleh-oleh Cirebon seperti pusat perbelanjaan Gronggong.

Meski demikian, Karmadi mengakui, masyarakat Desa Patapan belum berani untuk menjual produknya melalui *online shop* maupun ekspor, karena rentan retur.

“Pernah ditawarkan masuk Jogja Green, tapi kapasitas produknya harus 1 tronton. Yaudah cari yang aman aja. Sesuai kemampuan jual dan kemampuan modalnya,” jelas Karmadi

Karmadi berharap, kedepannya masyarakat dapat menciptakan produk lainnya, yang dapat mewujudkan ekonomi yang seimbang, makmur dan sejahtera.

“Semoga kedepannya banyak produk produk UMKM yang diproduksi, supaya terciptanya masyarakat yang *gemah ripah repeh rapih*,” ujar Karmadi. •Adv

Karangwuni

Prioritaskan Perbaikan Jalan Desa

Meski dengan keterbatasan anggaran, Pemdes Karangwuni fokus realisasikan perbaikan jalan desa. Seperti apa?

Tekad Pemerintah Desa (Pemdes) Karangwuni, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, mewujudkan desa maju tampaknya kian meningkat. Hal itu dibuktikan melalui pembenahan infrastruktur jalan desa yang tengah diperbaiki saat ini.

Kuwu Desa Karangwuni Suhedi mengatakan, di tahun pertama menjabat, Pemdes Karangwuni bersicepat memperbaiki jalan poros desa hingga gang-gang. Terlebih, jalan desa merupakan akses utama kegiatan para warga sehari-hari.

Skala prioritas perbaikan jalan, kata Suhedi, merupakan hasil musyawarah bersama pemerintah desa dengan masyarakat. Hal itu diseriusi bersama dengan seluruh elemen lembaga desa termasuk BPD, LPM dan karang taruna sebagai bentuk pengawasan.

Pada periode awal memimpin, Suhedi mengakui, Pemdes Karangwuni telah memperbaiki jalan desa tak kurang dari 17 km. Sementara pada periode kedua ini perbaikan jalan hanya baru terealisasi 600 meter, karena keterbatasan anggaran.

“Berbeda dengan periode pertama, perbaikan jalan dibantu swadaya dan masyarakat. Untuk menata jalan sepanjang 17 km kita butuh beberapa anggaran, namun kita tutup dengan anggaran yang diperoleh dari



foto: dok. prihatni

pemerintah dan swadaya,” ungkap Suhedi.

Dengan keterbatasan anggaran, Suhedi pun selektif memilih daerah atau lokasi yang menjadi skala prioritas perbaikan. Sebagaimana telah dirancang, penggunaan APBDes dialokasikan 50 persen untuk pertanian, ketahanan pangan dan 50 % untuk pembangunan.

“Intinya kami prioritaskan pembangunan infrastruktur desa terutama jalan. Dengan adanya perbaikan jalan aktivitas warga menjadi seperti bertani, dan

memudahkan petugas sampah untuk mengangkut sampah sampai ke TPS,” ujar Suhedi.” jelas Suhedi.

Selain perbaikan jalan desa, Suhedi juga telah merealisasikan pembangunan saluran air perusahaan daerah air minum (PDAM) ke seluruh rumah warga Desa Karangwuni.

“Kita telah lakukan penyaluran air bersih juga untuk warga dari PDAM yang terhubung ke seluruh blok di desa. Kami berharap langkah kami memajukan dewasa terus dapat didukung Pemkab Cirebon,” pungkasnya. • Sln



Kopi Lanang

Sebenarnya biji kopi ini anomali, alias kelainan, beda dengan biji kopi pada umumnya. Sebut saja, tidak normal. Namun, biji yang diberi nama kopi lanang ini justru dipercaya lebih berkhasiat, dan tentu saja berharga lebih mahal.

Umumnya (normalnya) dalam satu ceri kopi, terdapat dua biji (dikotil). Satu permukaan biji normal berbentuk pipih, dan satu permukaan lainnya cembung. Sedangkan ceri kopi anomali, hanya terdapat satu biji kopi (monokotil). Inilah yang disebut sebagai biji lanang atau *peaberry*. Bentuknya bulat melonjong seperti kacang, cenderung utuh tanpa terbelah.

Jumlah kopi lanang ini tidak banyak. Dalam satu kilogram ceri kopi, biasanya terdapat sekitar 50 gram kopi lanang, atau sekitar 5%. Apa karena langka ini jadi mahal? Ya, tapi faktor utama yang membuatnya mahal adalah khasiat yang diyakini dari biji kopi ini.

Kopi lanang diyakini mampu mendongkrak kinerja alat vital laki-laki. Keyakinan ini tentu berdasarkan pengalaman beberapa orang yang telah mengkonsumsinya. Selain itu, sebuah penelitian ilmiah menunjukkan bahwa mengonsumsi *peaberry* dapat meningkatkan hormon testosteron dan gairah laki-laki. Karena hal inilah, ia disebut kopi lanang.

Bevo Wahono (2016) dalam penelitiannya berjudul *Effects Of Peaberry Coffee On The Sexual Behavior and The Blood Testosterone Levels Of The Male Mouse (Mus musculus)* mengungkap khasiat kopi lanang. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah tikus putih (mencit) jantan.

Penelitian itu menunjukkan bahwa mencit yang diberi kopi lanang mengalami peningkatan hormon testosteron, hingga mencapai $8 \times 100\text{ng/dL}$, sedangkan yang mengonsumsi kopi normal konsentrasi testosteron hanya $7 \times 100\text{ng/dL}$.

Peningkatan hormon testosteron tersebut memicu perilaku mencit lebih agresif. Mencit yang tidak diberi asupan kopi biasanya melakukan "*kiss-*

ing vagina" hanya 2 kali sehari, setelah diberi kopi lanang meningkat hingga 6 kali sehari. Sedangkan mencit yang diberi kopi normal aktivitas "*kissing vagina*" hanya 3 kali sehari.

Penelitian itu menunjukkan bahwa di balik ketidaknormalan biji kopi, ada sebuah keunggulan. Di balik sesuatu yang cacat atau kekurangan, ada sebuah kelebihan. Begitulah kopi lanang mengajarkan bahwa hidup ini penuh keseimbangan.

Keseimbangan pada ketidaknormalan itu tentu juga berlaku bagi makhluk lainnya di bumi ini. Keadilan tidak akan terlepas dari ciptaan Tuhan Yang Maha Adil. Begitu pun dengan saudara-saudara kita yang lahir memiliki keterbatasan (disabilitas).

Betul bahwa ada kekurangan, tapi mereka juga memiliki keunggulan. Seorang tunanetra misalnya, dia akan memiliki kemampuan pendengaran, penciuman, dan perabaan yang lebih sensitif ketimbang manusia normal lainnya.

Dengan kemampuan pendengaran yang tajam mereka mampu mengoperasikan gawai dengan layar dimatikan (digelapkan). Bagi orang normal, itu sesuatu yang ajaib dan menakjubkan.

Artinya meski seseorang tidak mampu melihat, namun ia dapat mengoperasikan alat kerja, seperti komputer, laptop, atau ponsel secara baik. Karena itulah, mereka pun dapat bekerja atau produktif seperti orang kebanyakan.

Dengan fakta dan keyakinan itulah, DPRD Kabupaten Cirebon berupaya agar para penyandang disabilitas dapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Terlebih, kita sudah sering menyaksikan banyak kaum disabel yang justru berprestasi mengalahkan manusia normal.

Itulah salah satu alasan bagi DPRD Kabupaten Cirebon menyusun Perda tentang Disabilitas. Raperda ini sedang digodok, mohon dukungan agar segera selesai. Harapannya potensi dan keunggulan kaum disabel dapat berperan penting dalam pembangunan Kabupaten Cirebon.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Selamat Hari Lahir



PANCASILA

1 Juni 1945 - 1 Juni 2023



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Selamat Hari Raya

